

SKRIPSI

ANALISIS PENGATURAN PENANAMAN MODAL ASING DALAM BIDANG
PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM
INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

OLEH:

WAHYUDI WIRJA

1210112195

Program Kekhususan :Hukum Internasional



Dosen Pembimbing :

1. Prof. H. Firman Hasan, S.H.,LL.M.
2. Sri Oktavia, S.H.,M.Sc.,Ph.D.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2016

**ANALISIS PENGATURAN PENANAMAN MODAL ASING DALAM
BIDANG PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DI INDONESIA
BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL**

**WAHYUDI WIRJA, 1210112195, HUKUM INTERNASIONAL,
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS, 2017**

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang 2/3 wilayahnya adalah laut. Dengan kondisi geografis tersebut, Indonesia memiliki sumberdaya laut yang melimpah salah satunya adalah ikan. Guna melaksanakan pembangunan di sektor perikanan negara membutuhkan modal. Namun dalam penyediaan modal, Indonesia sebagai negara berkembang terkendala dalam pemenuhan modal tersebut sehingga membutuhkan keterlibatan asing melalui penanaman modal asing di Indonesia. Dalam mengundang investor asing maka diperlukan landasan hukum formal yang mengatur penanaman modal asing di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaturan penanaman modal asing di Indonesia dalam bidang pengelolaan perikanan berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan hukum Daftar Negatif Investasi dan perjanjian internasional dalam bidang investasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penggunaan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Pengaturan penanaman modal asing dalam bidang pengelolaan perikanan berdasarkan hukum internasional diatur dalam *Agreement on Trade Related Investment Measures* (TRIMs) dan *General Agreement Trade on Services* (GATS). Sedangkan berdasarkan hukum nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini dapat dikatakan aturan yang terdapat dalam DNI secara umum masih harmonis dengan ketentuan-ketentuan investasi internasional yang terdapat dalam TRIMs dan GATS. Sehingga Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) harus lebih mempersiapkan diri untuk bersaing dengan Penanaman Modal Asing (PMA). PMDN tidak bisa berlindung terus dibalik pengecualian-pengecualian atau pembatasan-pembatasan terhadap PMA yang masih dibenarkan berdasarkan aturan TRIMs dan GATS.

Kata Kunci :Penanaman Modal Asing, Pengelolaan Perikanan, Daftar Negatif Investasi

**ANALYSIS OF ARRANGEMENTS OF FOREIGN INVESTMENT IN THE
CAPTURE FISHERIES MANAGEMENT IN INDONESIA UNDER
INTERNATIONAL LAW AND NATIONAL LAW**

**WAHYUDI WIRJA, 1210112195, INTERNATIONAL LAW, FACULTY OF
LAW ANDALAS UNIVERSITY, 2017**

ABSTRACT

Republic of Indonesia is an archipelago that is 2/3 the area is the sea. With the geographical conditions, Indonesia has abundant marine resources one of which is a fish. In order to carry out development in the fisheries sector the country needs capital. However, in the provision of capital, Indonesia as a developing country in the fulfillment of these capital constrained and thus require foreign involvement through foreign investment in Indonesia. In inviting foreign investors will require a formal legal basis governing foreign investment in Indonesia. This study aimed to analyze the regulation of foreign investment in Indonesia in the field of fisheries management based on international law and national law. In addition, this study aims to look at the legal relationship Negative Investment List and international agreements in the field of investment. This study is a normative legal research using library research approach. The data used in this research is secondary data. The use of secondary data is done by means of literature study then analyzed qualitatively. The setting of foreign investment in the field of fisheries management based on international law stipulated in the Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs) and the General Agreement on Trade Services (GATS). While based on national law regulated in Law Number 25 Year 2007 regarding Investment, Law No. 45 of 2009 on Fisheries and Presidential Regulation No. 44 Year 2016 concerning List of Closed Business And List of Business Sectors Opened with Reservation in Capital investment. Based on the discussion in this study can be said that the rules contained in the DNI in general is still in harmony with the provisions contained in the international investment TRIMs and GATS. So growers Domestic Investment (DCI) must be prepared to compete with foreign capital investment (PMA). Domestic investment can not continue to shelter behind the exemptions or restrictions on FDI is still justified by the rules of TRIMs and GATS.

Keywords: Foreign Investment, Fisheries Management, Investment Negative List